LAMPIRAN L
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

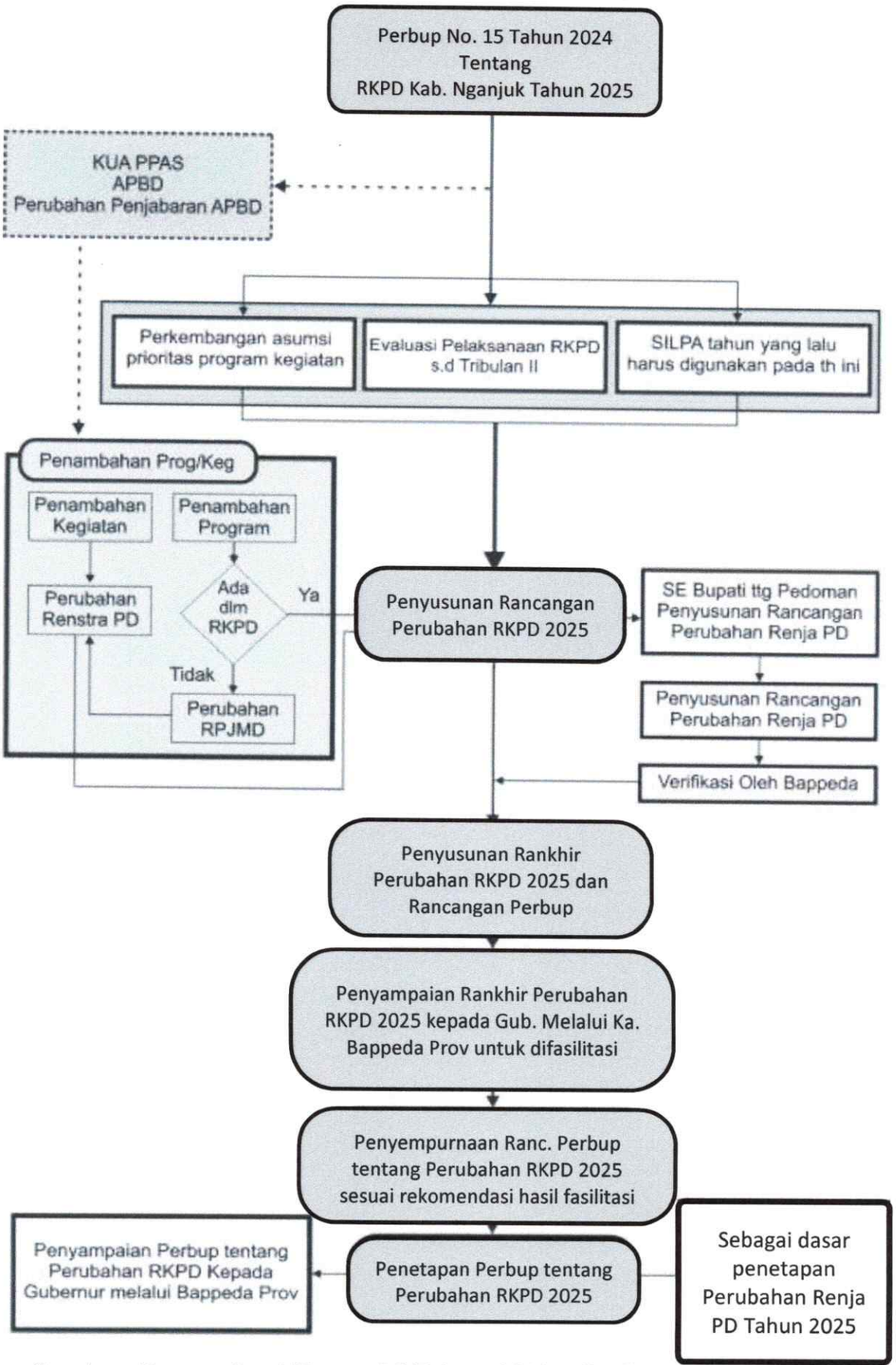
Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.
Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 edit diagram

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5315);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tantang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventasisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Badan kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapiltuasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Nganjuk
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8	**Urusan Pemerintahan Umum**									
8,01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77 Nilai		76 Nilai	72 Nilai	94,74%	77 Nilai	0 Nilai	0%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Perkantoran	-	92						
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun	22 lap	4 dok	15 lap	15 dok	100%	22 lap	8 lap	36%
8.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 dok	-	4 dok	4	100%	11 dok	4 dok	36%
8.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	11 lap	4 lap	11 lap	11 lap	100%	11 lap	4 lap	36%
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	39 dok	3 dok	39 dok	41 dok	105%	39 dok	9 dok	23%
8.01.01.2.02.0001	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	15 org/bln	14 org/bln	15 org/bln	14 org/bln	93%	15 org/bln	13 org/bln	87%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%
8.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 lap	4 dok	12 lap	12 lap	100%	12 lap	3 lap	25%
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dokumen	1 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	0 dok	0%
8.01.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 paket	2 dok	-	-	-	1 paket	0 paket	0%
8.01.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 orang	30 org	30 org	30 org	100%	30 org	0 org	0%
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen administrasi umum yang disediakan	4 jenis	4 dok	4 jenis	4 dok	100%	4 jenis	1 jenis	25%
8.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	1 paket	20%
8.0101.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	0 paket	0%
8.01.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	5 dokumen	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	3 dok	60%
8.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	26 Laporan	30 lap	26 lap	36 lap	138%	26 lap	6 lap	23%
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	2 dokumen	1 dok	4 dok	1 dok	25%	2 dok	0 dok	0%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	129 unit	-	58 unit	58 unit	100%	129 unit	0 unit	0%
8.01.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 unit	7 unit	13 unit	13 unit	100%	6 unit	0 unit	0%
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 laporan	3 dok	4 lap	3 dok	75%	3 lap	1 lap	33%
8.01.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0 lap	0%
8.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 laporan	3 lap	3 lap	2 lap	67%	2 lap	1 lap	50%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	4 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	0 jenis	0%
8.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 unit	8 unit	8 unit	7 unit	88%	8 unit	0 unit	0%
8.01.01.2.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	10 unit	0	25 unit	25 unit	100%	10 unit	- unit	0%
8.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 unit	30 unit	33 unit	33 unit	100%	25 unit	0 unit	0%
8.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80%	91%	80%	85%	106%	80%	0%	0%
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3300 orang	1000 org	2.400 org	2.029 org	85%	3.300 org	0 org	0%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.02.2.01.0003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	3300 orang	1000 orang	2.400 org	2029 org	85%	3.300 org	0 org	0%
8.01.02.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	3 laporan	4 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	1 lap	33%
8.01.02.2.01.0007	*Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka*	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan*	1 Dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0 dok	0%
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partai politik yang berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan	80%	100%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah Partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemerintahan	9 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	9 parpol	0 parpol	0%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.03.2.01.0003	*Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	2000 orang	208 org	600 org	589 org	98%	2000 org	0 org	0%
8.01.03.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	33 Orang	10 parpol	42 org	42 org	100%	33 org	6 org	18%
8.01.03.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	3 laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	1 lap	33%
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	81%	92%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	5 ormas	11 ormas	21 ormas	21 ormas	100%	5 ormas	0 ormas	0%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.04.2.01.0003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	115 orang	11 ormas	115 org	92 org	80%	115 org	0 org	0%
8.01.04.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	3 laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	1 lap	33%
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase peningkatan dan pemahaman Masyarakat terhadap ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	81%	90%	80%	98%	123%	81%	0%	0%
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	1200 orang	406 org	1.200 orang	1.181 org	98%	1.200 orang	0 orang	0%
8.01.05.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	1200 orang	406 org	1.200 orang	1181 org	98%	1.200 orang	0 orang	0%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.05.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	3 Laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	1 lap	33%
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase penurunan konflik sosial di tengah masyarakat	81%	80%	80%	85%	106%	81%	0%	0%
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	200 orang	12 lap	250 orang	218	87%	200 orang	0 orang	0%
8.01.06.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	200 orang	12 lap	250 orang	218 org	87%	200 orang	0 orang	0%
8.01.05.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	12 laporan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	3 lap	25%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d Tribulan I tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.05.2.01.0006	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	12 dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	3 dok	25%

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilakukan analisa untuk masing-masing Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

   Program ini digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penunjang/rutinitas kantor seperti penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, gaji ASN dan sebaginya.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

   Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah pembentukan dan pembinaan paskibraka, sosialisasi peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Peningkatan edukasi kebangsaan. Pemantapan wawasan kebangsaan di 20 kecamatan, Upacara hari lahir Pancasila, Sosialisasi Bela Negara bagi perempuan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

   Pada program ini digunakan untuk keperluan hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarkat.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas

   Pada program ini digunakan untuk hibah kepada ormas/LSM maupun sosialisasi pembinaan ormas.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

   Pelaksanaan program ini yaitu sosialisasi forum kerukunan umat beragama, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta penganut aliran kepercayaan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial

   Pelaksanaan program ini untuk pembentukan Forkopimda, Timdu penanganan konflik sosial, Tim Kewaspadaan dini daerah, sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing

indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan I Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan pengukuran pada Program ini dilakukan pada tribulan II	Beban kerja menumpuk di Tribulan II	Memaksimalkan SDM yang ada
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	-	-
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan dimulai Tribulan II	Beban kerja menumpuk di Tribulan II	Memaksimalkan SDM yang ada
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidik-An Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-

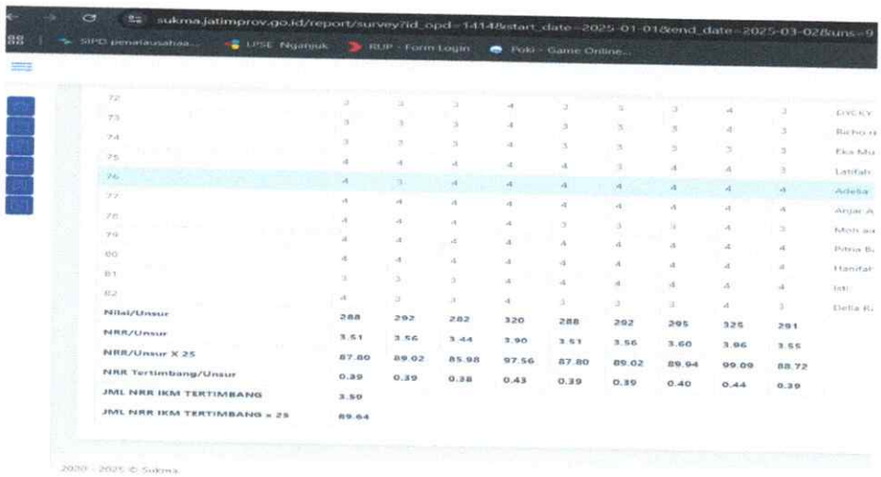
Program Perangkat Daerah	Capaian kinerja	Predikat
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pencairan Hibah Banpol menunggu LHP BPK	Beban kerja menumpuk di Tribulan II	Memaksimalkan SDM yang ada
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas	-	-
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Tribulan II	Beban kerja menumpuk di Tribulan II	Memaksimalkan SDM yang ada
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	-	-
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Tribulan II	Beban kerja menumpuk di Tribulan II	Memaksimalkan SDM yang ada
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	-	-
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	-	-

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Dari hasil yang telah dicapai sampai dengan Tribulan I Tahun 2025, maka dapat disajikan data dan informasi dari unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.4
Indeks Kepuasan Masyarakat
Bulan Januari s/d Maret 2025



72	3	3	3	4	3	3	3	4	3	DYCKY
73	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Richo ri
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Eka Mu
75	4	4	4	4	4	3	4	4	3	Latifah
76	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Adella
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Anjar A
78	4	4	4	4	3	3	3	4	3	Moh ari
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Putria B
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hanifah
81	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Iati
82	4	3	3	4	3	3	3	4	3	Della R
Nilai/Unsur	288	292	282	320	288	292	295	325	291	
NRR/Unsur	3.51	3.56	3.44	3.90	3.51	3.56	3.60	3.96	3.55	
NRR/Unsur X 25	87.80	89.02	85.98	97.56	87.80	89.02	89.94	99.09	88.72	
NRR Tertimbang/Unsur	0.39	0.39	0.38	0.43	0.39	0.39	0.40	0.44	0.39	
JML NRR IKM TERTIMBANG	3.50									
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	89.64									

2020 - 2025 © Sukma

Berdasarkan data e-sukma maka nilai Indeks Kepuasaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Bulan Januari sampai dengan Maret 2025 adalah 89,64. Dari Nilai teresebut terdiri dari 82 responden/pengguna layanan.

b. Jumlah Konflik Sosial dan keagamaan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 tidak ada konflik sosial yang terjadi, namun ada 2 potensi konflik. Hal ini disebabkan karena upaya-upaya pencegahan yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada telah dimanfaatkan diantaranya memaksimalkan forkopimda, timdu penanganan konflik, tim kewaspadaan dini daerah dan upaya-upaya sosialisasi maupun pembinaan yang telah dilakukan.

c. Jumlah Partai Politik

Pada tahun 2024 jumlah partai politik yang mengikuti Pemilu di Kabupaten Nganjuk sebanyak 18 partai yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat. Partai yang memiliki kursi di DPRD periode 2024-2029 sebanyak 9 Partai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun Renstra Perangkat Daerah			Realiasai Capaian			Proyeksi	Capaian Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	
1.	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	-	-	93%	94%	95%	100%			100%	

Berdasarkan tabel tersebut maka Indikator kinerja Utama tahun 2025 adalah Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi yang mana perhitungannya adalah selama satu tahun dengan rumus : potensi gangguan/konflik yang teratasi dibagi jumlah potensi gangguan/konflik yang terjadi dikali 100%.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nganjuk		Rp. 200.000.000,-	Hibah kepada Nahdlatul Ulama Kab. Nganjuk
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nganjuk		Rp. 100.000.000,-	Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas Pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik.
6. Peningkatan kondisi sosial Masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Umum.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang adalah "Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik" dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Penanganan konflik sosial	Persentase Penanganan Konflik sosial di daerah	82 %

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Peningkatan Pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik.	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	94%

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Untuk mendukung tema dan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan realokasi dan penambahan Anggaran yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Anggaran Renja Tahun 2025
Bakesbangpol

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)	Ket
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.253.625.113	6.022.886.384	769.261.271	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.748.500	114.244.500	-31.504.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.670.000	35.675.000	-17.995.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.078.500	78.569.500	-13.509.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.499.872.000	2.615.823.000	115.951.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.407.217.000	2.542.313.000	135.096.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.840.000	9.708.000	-3.132.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.815.000	63.802.000	-16.013.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.522.250	2.750.000	-104.772.250	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	9.734.250	-	-9.734.250	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97.788.000	2.750.000	-95.038.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.064.389	435.159.911	-262.904.478	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.244.889	115.544.911	-21.699.978	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.512.500	34.855.000	13.342.500	

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)	Ket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.307.000	275.760.000	-254.547.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**884.014.924**	**1.287.630.823**	**403.615.899**	
	Pengadaan Mebel	207.302.535	384.377.535	177.075.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.712.389	903.253.288	226.540.899	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**69.450.000**	**69.450.000**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000	67.200.000	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**848.953.050**	**1.497.828.150**	**648.875.100**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.981.250	275.981.250	6.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	400.000	-3.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.019.800	219.734.900	-19.284.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	335.952.000	1.001.712.000	665.760.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**2.959.940.840**	**2.602.117.540**	**-357.823.300**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**2.959.940.840**	**2.602.117.540**	**-357.823.300**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.495.873.800	1.186.955.500	-308.918.300	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.850.000	12.345.000	-8.505.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.443.217.040	1.402.817.040	-40.400.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**5.358.948.000**	**3.573.952.000**	**-1.784.996.000**	

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)	Ket
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.358.948.000	3.573.952.000	-1.784.996.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	397.407.500	219.893.000	-177.514.500	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.927.657.500	3.335.105.000	-1.592.552.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33.883.000	18.954.000	-14.929.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	927.182.100	1.259.254.200	332.072.100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	927.182.100	1.259.254.200	332.072.100	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	919.682.100	1.255.504.200	335.822.100	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.500.000	3.750.000	-3.750.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	502.393.350	341.105.850	-161.287.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	502.393.350	341.105.850	-161.287.500	

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)	Ket
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.893.350	340.355.850	-160.537.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.500.000	750.000	-750.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.118.201.150	1.091.137.250	-27.063.900	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.118.201.150	1.091.137.250	-27.063.900	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	351.819.150	354.768.750	2.949.600	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.125.000	18.156.000	-12.969.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	735.257.000	718.212.500	-17.044.500	
	Total	16.120.290.553	14.890.453.224	-1.229.837.329	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  Penambahan ini digunakan untuk menambah belanja gaji dan tunjangan, penambahan jasa publikasi pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pembayaran pajak kendaraan roda empat dan pemeliharaan gedung kantor.
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pada Program ini dilakukan efisiensi/pengurangan anggaran.

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik.

  Pada program ini dilakukan pengurangan anggaran pada belanja hibah bantuan keuangan partai politik dan pengurangan sosialisai pendidikan politik.
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

  Penambahan pagu ini untuk menampung usulan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan bertambah sebanyak 2 ormas/lembaga.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Pada program ini dilakukan pengurangan anggaran dari masing-masing sub kegiatan.

  Penambahan ini digunakan untuk menambah belanja Nilai Indeks Kewaspadaan Kabupaten Nganjuk.

Selain dari tambahan pagu anggaran untuk Program dan Kegiatan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui rapat-rapat internal juga melakukan refocusing untuk sub kegiatan dan dialihkan kepada sub kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung tujuan maupun sasaran dari Perangkat Daerah.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**14.335.450.000,00**	**16.120.290.553,00**	**14.890.453.224,50**	**555.003.224,50**							**13.782.600.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**14.335.450.000,00**	**16.120.290.553,00**	**14.890.453.224,50**	**555.003.224,50**							**13.782.600.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**14.335.450.000,00**	**16.120.290.553,00**	**14.890.453.224,50**	**555.003.224,50**							**13.782.600.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				**77 Nilai**	**77 Nilai**	**5.288.466.060,00**	**5.253.625.113,00**	**6.022.886.384,50**	**-959.466.060,00**							**4.329.000.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				15 Laporan	15 Laporan	125.487.500,00	145.748.500,00	114.244.500,00	-11.243.000,00			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		131.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40.527.000,00	53.670.000,00	35.875.000,00	-4.652.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			41.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	84.960.500,00	92.078.500,00	76.569.500,00	-8.391.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun*				39 dokumen	39 dokumen	2.555.858.947,00	2.499.872.000,00	2.615.823.000,00	58.964.053,00			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		2.775.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.483.886.947,00	2.407.217.000,00	2.542.313.000,00	58.426.053,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.840.000,00	12.840.000,00	9.708.000,00	-2.132.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.132.000,00	79.815.000,00	63.802.000,00	3.670.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			62.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-27 11:07:25

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan*				2 dokumen	2 dokumen	107.522.250,00	107.522.250,00	2.750.000,00	-104.772.250,00			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	9.734.250,00	9.734.250,00	0,00	-9.734.250,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	97.788.000,00	97.788.000,00	2.750.000,00	-95.038.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis dokumen administrasi umum yang disediakan*				4 jenis	4 jenis	702.179.389,00	698.064.389,00	435.159.911,50	-267.019.477,50			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		705.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	137.269.889,00	137.244.589,00	115.544.911,50	-21.724.977,50	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.512.500,00	21.512.500,00	34.855.000,00	13.342.500,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	534.307.000,00	530.307.000,00	275.760.000,00	-258.637.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Kelentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SIPD-RI , diolah pada 2025-05-27 11:07:25

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan*				4 dokumen	4 dokumen	884.014.924,00	884.014.924,00	1.287.630.823,00	403.615.899,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				129 Unit	160 Unit	207.302.535,00	207.302.535,00	384.377.535,00	177.075.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20 Unit	676.712.389,00	676.712.389,00	903.253.288,00	226.540.899,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	63.450.000,00	69.450.000,00	69.450.000,00	6.000.000,00			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		68.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	61.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	6.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan*				4 Jenis	4 Jenis	848.953.050,00	848.953.050,00	1.497.828.150,00	648.875.100,00			-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Bakesbangpol		434.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	269.981.250,00	269.981.250,00	275.981.250,00	6.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				19 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	230.019.800,00	230.019.800,00	219.734.900,00	-10.284.900,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	335.952.000,00	335.952.000,00	1.001.712.000,00	665.760.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**				**80 %**	**80 %**	**2.882.811.840,00**	**2.959.940.840,00**	**2.602.117.540,00**	**-59.811.840,00**							**2.823.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Penumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan*				2472 Orang	3000 Orang	2.882.811.840,00	2.959.940.840,00	2.602.117.540,00	-280.694.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Masyarakat/pelajar		2.823.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2400 Orang	3000 Orang	1.418.744.800,00	1.495.873.800,00	1.186.955.500,00	-231.789.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3 Laporan	3 Laporan	20.850.000,00	20.850.000,00	12.345.000,00	-8.505.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepasikibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	1.443.217.040,00	1.443.217.040,00	1.402.817.040,00	-40.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan**				**80 %**	**80 %**	**3.616.395.500,00**	**5.358.948.000,00**	**3.573.952.000,00**	**38.604.500,00**							**3.655.000.000,00**	

SIPD-RI Jadwal pada 2025-05-27 13:57:25

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Penumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan*				10 Parpol	9 Parpol	3.616.395.500,00	5.358.948.000,00	3.573.952.000,00	-42.443.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Partai Politik dan masyarakat		3.665.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	400 Orang	397.407.500,00	397.407.500,00	219.893.000,00	-177.514.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30 Orang	30 Orang	3.185.165.000,00	4.927.657.500,00	3.335.165.000,00	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	33.883.000,00	33.883.000,00	18.954.000,00	-14.929.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan**				**81 %**	**81 %**	**927.182.100,00**	**927.182.100,00**	**1.259.254.200,00**	**81.817.900,00**							**1.009.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Penumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan*				5 ormas	7 ormas	927.182.100,00	927.182.100,00	1.259.254.200,00	332.072.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Ormas dan masyarakat		1.009.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				115 Orang	21 Orang	919.682.100,00	919.682.100,00	1.255.504.200,00	335.822.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**				**81 %**	**81 %**	**502.393.350,00**	**502.393.350,00**	**341.185.850,00**	**50.606.650,00**							**553.000.000,00**	

SIPD-RI : Jadwal pada 2025-05-27 11:07:25

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya*				1200 Orang	900 Orang	502.393.350,00	502.893.350,00	341.105.850,00	-161.287.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Masyarakat/pelajar		553.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kejercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1200 Orang	900 Orang	500.893.350,00	500.893.350,00	340.355.850,00	-160.537.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional**				**81 %**	**81 %**	**1.118.201.150,00**	**1.118.201.150,00**	**1.091.137.250,00**	**294.798.850,00**							**1.413.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini*				200 Orang	200 Orang	1.118.201.150,00	1.118.201.150,00	1.091.137.250,00	-27.063.900,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Masyarakat		1.413.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	200 Orang	351.819.150,00	351.819.150,00	354.768.750,00	2.949.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	31.125.000,00	31.125.000,00	18.156.000,00	-12.969.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	735.257.000,00	735.257.000,00	718.212.500,00	-17.044.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya			880.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH							**14.335.450.000,00**	**16.120.296.583,00**	**14.890.453.224,50**	**555.003.224,50**							**13.782.000.000,00**	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-27 11:07:25

Untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum diberikan **Belanja Hibah** kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Belanja Hibah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat					Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah			Rincian	
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang		
1	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Belanja Hibah Uang	DPC PDIP	1.017.742.500	1.017.742.500	-		DAU
			DPC PKB	955.125.000	955.125.000	-		DAU
			DPC Partai Hanura	481.650.000	481.650.000	-		DAU
			DPC Partai Gerindra	647.762.500	647.762.500	-		DAU
			DPD Partai Golkar	483.375.000	483.375.000	-		DAU
			DPC Partai Demokrat	487.725.000	487.725.000	-		DAU
			DPD Partai Nasdem	384.825.000	384.825.000	-		DAU
			DPD PKS	163.845.000	163.845.000	-		DAU
			DPC PPP	155.587.500	155.587.500	-		DAU
			Kodim 0810	50.000.000	50.000.000	-		DAU
			Kepolisian resor Nganjuk	100.000.000	100.000.000	-		DAU
	JUMLAH			4.927.637.500	4.927.637.500	-		
2	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Belanja Hibah Uang	Badan Amil Zakat Nasional Kab. Nganjuk	200.000.000	200.000.000	-		DAU
			Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Nganjuk	100.000.000	100.000.000	-		DAU
			Forum pembauran Kebangsaan kabupaten Nganjuk	100.000.000	100.000.000	-		DAU
			Majelis Ulama Indonesia Kab. Nganjuk	200.000.000	200.000.000	-		DAU
			DPD LDII Kab. Nganjuk	100.000.000	100.000.000	-		DAU
			Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Kab. Nganjuk	-	30.000.000	30.000.000		DAU
			Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Nganjuk	-	100.000.000	100.000.000		DAU
			Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kab. Nganjuk	-	200.000.000	200.000.000		DAU
	JUMLAH			700.000.000	1.030.000.000	330.000.000		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai korelasi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001